



***Stakeholder Engagement* dalam Kebijakan Pariwisata Kota Berkelanjutan di Kota Yogyakarta**

Stakeholder Engagement in Sustainable City Tourism Policy in Yogyakarta City

Eduardus Didaktus Dagun Hatu¹, Hardian Wahyu Widiyanto²

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

²Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Diterima 04-06-24

Diperbaiki 06-06-24

Disetujui 12-06-24

Kata Kunci:

Stakeholder Engagement, Pariwisata Kota Berkelanjutan, Kota Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami *stakeholder engagement* dalam kebijakan pariwisata Kota berkelanjutan di Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian metode kualitatif melalui tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta, Pihak Swasta, Masyarakat Lokal Kota Yogyakarta, Wisatawan, serta Aktor Non-Pemerintah. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, dokumen, laporan, dan gambar/foto. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti dengan menggunakan pedoman wawancara dan observasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Sedangkan teknik analisis data melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses *stakeholder engagement* pariwisata Kota Yogyakarta belum optimal karena tumpang tindih program pelatihan dan sertifikasi antara Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Selain itu, wisatawan yang tidak merawat sarana dan prasarana, seperti di Kawasan Malioboro juga menghambat pembangunan pariwisata. Implikasinya, pada tata kelola *stakeholder* yang ada di Kota Yogyakarta.

ABSTRACT

This research aims to understand stakeholder engagement in sustainable city tourism policies in the city of Yogyakarta. This research is a qualitative research method using three data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. The informants in this research were the Yogyakarta Special Region Government and Yogyakarta City Government, Private Parties, Yogyakarta City Local Communities, Tourists, and Non-Governmental Actors. Secondary data was obtained through literature studies, documents, reports and images/photos. The data collection techniques used in this research are interviews, observation and documentation. The instruments in this research were researchers using interview and observation guidelines. The data validity checking technique uses source triangulation. Meanwhile, data analysis techniques go through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research show that the Yogyakarta City tourism stakeholder engagement process is not yet optimal due to overlapping training and certification programs between the Yogyakarta Special Region Tourism Office and the Yogyakarta City Tourism Office. Apart from that, tourists who do not maintain facilities and infrastructure, such as in the Malioboro area, also hinder tourism development. The implication is for stakeholder governance in the city of Yogyakarta.

Keywords:

Stakeholder Engagement, Sustainable City Tourism, City of Yogyakarta

1. Pendahuluan

Sektor pariwisata saat ini merupakan salah satu sektor andalan dan sangat menjanjikan untuk dikembangkan karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah [1]. Pengembangan pariwisata yang terjadi di Indonesia terbilang pesat terlebih hal tersebut ditunjang dengan banyaknya potensi yang dimiliki Indonesia. Alam dan budaya merupakan potensi utama yang dimiliki Indonesia [2]. Kota Yogyakarta adalah salah satu daerah di Indonesia yang sudah terkenal akan pariwisatanya. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara berkunjung ke Kota Yogyakarta di tiap tahunnya dan hingga saat ini Kota Yogyakarta terus melakukan pengembangan dan juga pembangunan guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan [3]. Berikut merupakan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Yogyakarta disajikan melalui data berikut:



Gambar 1.1 Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Ke Kota Yogyakarta Tahun 2017 -2021

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan data statistik diatas jumlah kunjungan wisatawan di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 397.951 wisatawan mancanegara dan 4.831.347 wisatawan nusantara. Pada tahun 2018 jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 416.373 dan 5.272.718 wisatawan nusantara. Lalu pada tahun 2019 jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 433.027 dan 6.116.354 wisatawan nusantara. Kemudian di tahun 2020 kunjungan wisatawan mengamai penurunan karena terjadi pandemi *Covid-19*, tercatat sebanyak 69.968 wisatawan mancanegara dan 1.778.580 wisatawan nusantara. Hal ini mengalami penurunan 71,78%. Sementara pada tahun 2021 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara hanya 14.740 dan 4.294.725 wisatawan Nusantara [4].

Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan yang cukup signifikan tentu hal tersebut akan berbanding lurus dengan peningkatan ekonomi yang ada di Kota Yogyakarta. Hal itu tidak bisa terlepas dari peran berbagai pihak yang secara langsung dan tidak langsung ikut berperan di dalamnya. Namun, sektor pariwisata bisa diibaratkan sebagai pisau bermata dua dimana selain dampak positif, dibalik

itu pariwisata juga memberikan dampak negatif yang sering kali diabaikan. *Mass tourism* di Kota Yogyakarta ini telah berdampak kepada aspek sosial, ekonomi serta lingkungan. Dalam aspek sosial, salah satu dampak yang terjadi adalah maraknya kasus prostitusi. Seperti yang kita lihat pada data kunjungan wisatawan di atas, banyaknya wisatawan terutama wisatawan mancanegara yang datang ke Kota Yogyakarta selain ingin menikmati objek wisata yang ada, kebanyakan mereka juga memilih wisata sex ke Yogyakarta dengan segmen pelakunya kebanyakan adalah pelajar ataupun mahasiswa [5]. Sedangkan dari aspek ekonomi, berkembang pesatnya sektor pariwisata dapat menyebabkan kenaikan biaya hidup bagi penduduk setempat namun UMR Kota Yogyakarta masih terbilang rendah dibandingkan daerah-daerah lainnya [6].

Kemudian dari aspek lingkungan, permasalahan pariwisata di Kota Yogyakarta yaitu meningkatnya volume sampah yang menyebabkan bau tidak sedap di beberapa lokasi wisata di Kota Yogyakarta seperti di Kawasan Malioboro. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, jumlah volume sampah di Kota Yogyakarta pada tahun 2023 mencapai 2.176,42 ton perhari dan 66.036,59 per bulan. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi bukti bahwa pariwisata di Kota Yogyakarta belum sepenuhnya merefleksikan paradigma keberlanjutan. Penelitian ini menjadi penting mengingat dampak negatif dari perkembangan pariwisata harus segera ditangani dan ada kebijakan berkelanjutan segera tercapai agar masalah yang ada tidak semakin meluas atau bahkan menimbulkan masalah baru kedepannya. Perlu adanya kebijakan yang nyata agar permasalahan-permasalahan tersebut dapat teratasi. Dalam hal tersebut tentu tidak akan terlepas dari peran *stakeholder* yang terlibat.

Dalam konteks Kota Yogyakarta kerjasama antara *stakeholder* mengalami beberapa permasalahan yang terjadi yaitu minim informasi akan pembangunan pariwisata sehingga masyarakat seringkali tidak siap menghadapi dampak negatifnya. Hal ini dikarenakan tidak adanya transparansi kepada publik yang sering dikeluhkan masyarakat Kota Yogyakarta. Malioboro bisa dikatakan sebagai wujud atas realita pembangunan pariwisata di Kota Yogyakarta karena hampir semua masalah terdapat disana terutama perihal ketidak transparanan dalam pembangunannya. PKL yang merupakan *stakeholder* utama malah diabaikan suaranya dan tidak dilibatkan [7]. Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Aurelio (2022) terdapat juga permasalahan lain yang muncul yaitu kurangnya koordinasi dari *stakeholder* yang terjadi di level kelurahan. Kurangnya komunikasi antara *stakeholder* dan ketertutupan informasi membuat inisiatif pariwisata berbasis komunitas lokal tersisihkan oleh agenda elit.

Salah satu aspek kerjasama dan kolaborasi yang sangat berpengaruh terhadap program pembangunan adalah komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat. Setiap pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal harus berusaha untuk membangun komunikasi yang efektif dalam sebuah proyek pembangunan [9]. *Stakeholder* inilah yang nantinya akan membuat kebijakan yang akan direalisasikan bersama-sama guna membangun pariwisata yang lebih terarah dan berkelanjutan. Upaya kolaborasi dan kerjasama tersebut merupakan *stakeholder engagement* [10]. *Stakeholders engagement* adalah sebuah proses dalam kegiatan *public relations*

yang berurusan dengan bagaimana mempengaruhi pihak-pihak yang mungkin akan terpengaruh oleh keputusan organisasi [11].

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas tentang *stakeholder engagement* diantaranya adalah hasil penelitian Saputra (2020) yang berjudul “Tata Kelola Kolaborasi Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Masyarakat” dimana penelitian tersebut berlokasi di Kampung Wisata Tamansari, Kota Yogyakarta. Di dalam penelitian tersebut menunjukkan *stakeholder* yang berperan secara langsung dalam pengembangan pariwisata yang ada adalah Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Lurah Patehan, Akademisi, Pengelola Kampung Wisata, dan Pelaku/Penyedia Jasa Wisata. Dalam pengembangannya hanya *stakeholder primer* saja yang terlibat aktif dan belum ada kolaborasi antara *stakeholder primer* dengan *stakeholder sekunder* sehingga ada *miss* komunikasi dan perselisihan kebijakan. *Stakeholder engagement* belum berjalan dengan optimal di Kampung Wisata Tamansari, Kota Yogyakarta sehingga pengembangan yang ada terkesan lambat dan sampai saat ini Kampung Wisata Tamansari, Kota Yogyakarta masih berstatus “rintisan”.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut masih terdapat *research gap* yaitu cenderung menjelaskan jika adanya *stakeholder engagement* berimplikasi terhadap keberhasilan pencapaian target. Kurang adanya *stakeholder engagement* membuat target keberhasilan menjadi tidak optimal dan bahkan seperti kasus di atas bisa terjadi tumpang tindih kebijakan yang membuat pengembangan ataupun pembangunan terhambat. Namun, belum ada yang menganalisa lebih mendalam tentang pengaruh *stakeholder engagement* terhadap kebijakan pariwisata, inilah mengapa peneliti tertarik untuk mengkaji proses *stakeholder engagement* dalam kebijakan pariwisata kota berkelanjutan di Kota Yogyakarta. Penelitian tentang *Stakeholder Engagement* dalam Kebijakan Pariwisata Kota Berkelanjutan di Kota Yogyakarta diharapkan dapat membantu meningkatkan keterlibatan *stakeholder* dan membawa dampak positif bagi kebijakan pariwisata Kota berkelanjutan di Kota Yogyakarta.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai jenis penelitian dalam memahami dan mengeksplorasi permasalahan sosial dalam suatu individu maupun kelompok [13]. Pemilihan metode kualitatif dimaksudkan agar penulis memperoleh data maupun informasi yang menunjang penelitian mengenai *stakeholder engagement* dalam kaitannya dengan kebijakan pariwisata Kota berkelanjutan di Kota Yogyakarta. Lokasi ini dipilih karena antara permasalahan dengan indikator yang dipilih oleh peneliti relevan untuk dikaji. Waktu penelitian berlangsung mulai bulan Juni 2023 sampai dengan April 2024. Subjek penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pihak Swasta, Masyarakat Lokal Kota Yogyakarta, Wisatawan, dan Aktor Non- Pemerintah.

Penelitian ini merupakan penelitian metode kualitatif melalui tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan data dengan menggabungkan data sekunder melalui studi pustaka, dokumen, arsip-arsip, dan

gambar. Teknik keabsahan data digunakan sebagai pembanding antar jawaban informan seperti dari Teknik tersebut digunakan untuk membandingkan jawaban dari berbagai instansi terkait seperti Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Paniradya Kaistimewan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Yogyakarta, Dinas Kebudayaan, Sekretariat Daerah Bidang Ekonomi dan Kerjasama Kota Yogyakarta, UPT Kawasan Cagar Budaya Malioboro, Pihak Swasta, Masyarakat lokal Kota Yogyakarta, Wisatawan di Kota Yogyakarta serta Aktor Non-Pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan *stakeholder engagement* dalam kebijakan pariwisata Kota berkelanjutan di Kota Yogyakarta. Teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan masalah yang ada di Kota Yogyakarta terkait kebijakan pariwisata Kota berkelanjutan, maka peneliti akan menggunakan analisis indikator *stakeholder engagement* menurut Johnston (2010), yang dalam hal ini melibatkan tujuan dan sasaran, potensi sumber daya dan keterampilan, pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan dan tekanan publik, dialog/kolaborasi (*power sharing*), output hingga evaluasi. Indikator dari Johnston terpilih dalam penelitian ini karena indikator tersebut relevan dengan tujuan dari kebijakan pariwisata Kota berkelanjutan.

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan (*goals*) dan sasaran adalah suatu kondisi yang dapat menjadi penentu terhadap pelaksanaan kontestasi kepentingan dalam kebijakan yang dilakukan. Secara umum dalam konteks kebijakan publik, tujuan (*goals*) merupakan situasi yang diinginkan untuk dicapai melalui implementasi kebijakan tertentu. Tujuan dipengaruhi oleh tiga variabel yaitu kepentingan (*interest*), peran dan motivasi. Dalam pengimplementasian kebijakan variabel tujuan tersebut mempengaruhi dari pelaksanaan kebijakan pariwisata Kota berkelanjutan, yakni dapat menjadi pendukung maupun penghambat dalam proses pariwisata Kota berkelanjutan yang dilakukan diantara *stakeholder* yang terlibat [14].

Program-program prioritas pembangunan pariwisata Kota berkelanjutan di Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh *stakeholder* Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kota Yogyakarta diantaranya yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Perhimpunan Hotel dan Restoran Yogyakarta (PHRI), Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Yogyakarta (ASITA) dan Kelompok Masyarakat yang diwakili oleh Paguyuban Becak Wisata Yogyakarta. *Stakeholder* ini bertindak dalam merumuskan kebijakan pariwisata kota berkelanjutan. *Stakeholder* ini bertemu dalam Forum FGD se-DIY yang diselenggarakan forum dilakukan 1 (bulan) kali dalam setahun, forum koordinasi oleh yang dimotori oleh Bappeda Kota Yogyakarta sebagai langkah awal untuk mensinkronisasi kegiatan agar terjalin sinergi dan kolaborasi antar *stakeholder*, dipaparkan bahwa untuk

tahun 2023 pelaksanaan pariwisata berkelanjutan berfokus pada peningkatan jumlah kunjungan wisata, peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata Kota Yogyakarta, peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, dan pelestarian budaya dan lingkungan.

Semua *stakeholder* yang terlibat dalam FGD tersebut mempunyai keterkaitan dalam kebijakan pariwisata kota berkelanjutan di Yogyakarta, masing-masing memiliki kepentingan yang sama. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Yogyakarta berkepentingan dalam mengembangkan pariwisata sebagai salah satu sektor andalan perekonomian daerah. Selain itu pemerintah juga bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian budaya dan lingkungan di Kota Yogyakarta serta meningkatkan jumlah kunjungan wisata di Kota Yogyakarta. Sedangkan pihak swasta mempunyai kepentingan dalam penyediaan akomodasi dan meningkatkan promosi pariwisata di Kota Yogyakarta. Disisi lain, Masyarakat Lokal yang diwakili oleh Paguyuban Becak Wisata Yogyakarta tentunya mempunyai kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan para pengemudi becak dan keluarganya, hal ini tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Stakeholder engagement* terjadi ketika terdapat upaya terdapat upaya kolaborasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dari setiap *stakeholder* yang terlibat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata kota berkelanjutan di Yogyakarta yakni pada tahap tujuan (goals) dan sasaran tersebut sangat berpengaruh terhadap program yang dijalankan. Dimana dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata kota berkelanjutan ini, telah melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan yaitu pihak Pemerintah Daerah, pihak swasta, pihak masyarakat lokal, pihak wisatawan dan organisasi non-pemerintah. Pada awal pelaksanaan programnya multi aktor tersebut memiliki kepentingan serta tujuan yang sama, hal tersebut juga untuk mendukung kebijakan pariwisata Kota berkelanjutan di Yogyakarta.

3.2 Potensi Sumber Daya dan Keterampilan

Dalam upaya menunjang pembangunan pariwisata berkelanjutan yang dilakukan melalui pengembangan masyarakat dapat dioptimalkan melalui pemetaan potensi. Melalui kebijakan pariwisata kota berkelanjutan yang bertujuan dalam penyelesaian isu lingkungan, peningkatan ekonomi masyarakat hingga kesejahteraan masyarakat dimampukan dengan melakukan pemetaan terhadap potensi sumber daya serta keterampilan masyarakat yang dapat dilakukan dengan perencanaan kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan efisien dalam ketepatan sasaran kebijakan. Melalui temuan hasil penelitian terkait potensi sumber daya dan keterampilan yang dikembangkan, kebijakan pariwisata di Kota Yogyakarta sejauh ini melakukan pengembangan yang berfokus pada:

a. Peningkatan SDM dan Keterampilan Pariwisata

Berbagai program dalam mendukung peningkatan SDM dan Keterampilan Pariwisata di Kota Yogyakarta seperti pemberian keterampilan dan sertifikasi bagi pemandu wisata, pengembangan Rintisan Kelurahan, workshop untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sekitar seperti pelatihan tata boga, pelatihan bahasa inggris, dan pelatihan komputer. Hal ini menjadi bentuk

konkret pelaksanaan kebijakan pariwisata kota berkelanjutan yang dimampukan dalam meningkatkan kualitas masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pemberian keterampilan dan sertifikasi bagi pemandu wisata dilakukan oleh dua (2) OPD yaitu Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, hal ini menyebabkan tumpang tindih program yang mengarah kepada ego sektoral. Hal ini sejalan dengan pendapat Ritonga et al. (2023), yang mengatakan ego sektoral terjadi apabila setiap OPD berjalan sendiri-sendiri dan lebih mengutamakan kepentingan masing-masing Ego sektoral yang terjadi antara OPD ini menyebabkan pemborosan anggaran dan inefisien. Hal ini dirasakan oleh pemandu wisata yang merasa bingung dan bosan dalam mengikuti kegiatan yang sama dari kedua OPD.

b. Ketersediaan Lapangan Kerja

Produktivitas yang tinggi di suatu daerah dapat juga diamati melalui keberadaan pihak swasta yang ada. Semakin banyak aktivitas pihak swasta maka semakin tinggi produktivitas suatu daerah. Dalam hal ini peran pihak swasta bagi suatu daerah tidak hanya meningkatkan PAD melainkan juga memecahkan permasalahan pengangguran melalui ketersediaan lapangan pekerjaan. Hal ini sejalan dengan upaya kebijakan pariwisata kota berkelanjutan dalam memperkuat perekonomian sekitar (*strengthening economies*) melalui lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pihak swasta. Pihak swasta yang ada turut serta menanggulangi jumlah pengangguran terbuka di Kota Yogyakarta yang terhitung cukup tinggi sekaligus mengatasi permasalahan kemiskinan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat sekitar dalam produktivitas atas pihak swasta.

c. Kemandirian Finansial

Peran pengembangan UMKM berkaitan dalam membangun masyarakat daerah yang mandiri secara ekonomi dan mampu memenuhi kebutuhan produksinya. Upaya membangun SDM yang handal dapat ditempuh melalui pengadaan pelatihan berkelanjutan dan pemberian modal usaha yang dapat diberikan dalam mengembangkan UMKM daerah. Disisi lain melalui prioritas pembangunan daerah yang dilakukan dengan memetakan potensi yang ada di Kota Yogyakarta, dalam Forum FGD, dipaparkan upaya Pemerintah Daerah yang mengajak semua stakeholder untuk turut serta terlibat melalui pelaksanaan kebijakan pariwisata kota berkelanjutan dalam pengembangan potensi sumber daya dan keterampilan masyarakat di Kota Yogyakarta. Ajakan ditempuh melalui pelaksanaan beberapa even besar seperti Wayang Jogja Night Carnival (WJNC). Wayang Jogja Night Carnival (WJNC) adalah acara tahunan yang dilaksanakan secara rutin sejak pertama kali pada tahun 2016.

3.3 Kondisi Sosial, Lingkungan, Ekonomi dan Tekanan Publik

Dalam kaitannya dengan pariwisata, pengaruh-pengaruh dari berbagai aspek tentu saja mewarnai pelaksanaan pariwisata berkelanjutan oleh semua *stakeholder* di Kota Yogyakarta. Pengaruh yang timbul tersebut berdampak bagi capaian pelaksanaan pariwisata berkelanjutan. Aspek terkait yang biasanya dapat menjadi pemicu dari dilaksanakannya pariwisata berkelanjutan diantaranya sosial, ekonomi, dan lingkungan, dalam hal ini masyarakat. Pengaruh ini dihadap baik

secara langsung oleh pemerintah Provinsi DIY dan daerah Kota Yogyakarta, pihak swasta, masyarakat, wisatawan, dan aktor non-pemerintah.

Berdasarkan temuan dilapangan bahwa, dalam aspek sosial kebijakan pariwisata berkelanjutan di Kota Yogyakarta sangat didukung oleh keterbukaan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Masyarakat yang terbuka ini mempermudah pencapaian tujuan kebijakan karena mereka tidak hanya menerima, tetapi juga aktif berkontribusi dalam pelaksanaan pariwisata berkelanjutan. Namun, beberapa hambatan masih muncul, terutama dalam hal perawatan sarana dan prasarana wisata. Hambatan ini menunjukkan perlunya pengelolaan dan pengawasan yang lebih baik dari semua pihak terkait.

Aspek selanjutnya yang dianggap cukup berpengaruh bagi pelaksanaan kebijakan pariwisata kota berkelanjutan di Kota Yogyakarta adalah lingkungan dan tekanan publik yang keduanya saling berkaitan. Kondisi yang dihadapi oleh masyarakat Kota Yogyakarta sehingga memungkinkan terlaksananya kebijakan pariwisata Kota berkelanjutan biasanya berkaitan dengan masalah lingkungan. Dampak operasional dari hotel, café, homestay, dan ritel berupa sampah atau limbah yang berimbas pada penurunan kualitas lingkungan menjadi prioritas pelaksanaan kebijakan pariwisata kota berkelanjutan yang dilakukan secara masif. Berbagai dampak yang ditimbulkan baik yang dapat diukur maupun tidak seperti halnya masalah sampah dan pencemaran suara dari pihak swasta memungkinkan bagi hotel, café, homestay, dan ritel untuk bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan. Kontribusi ini bertujuan untuk mendukung pariwisata Kota berkelanjutan.

Selain aspek sosial dan lingkungan aspek berikutnya yang berpengaruh yakni aspek ekonomi. Munculnya masalah terkait persaingan dalam lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan dengan perkembangan pariwisata yang pesat di Kota Yogyakarta sehingga memungkinkan terlaksananya kebijakan pariwisata Kota berkelanjutan. Tingginya persaingan dalam lapangan pekerjaan di Kota Yogyakarta menjadi permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Keterbatasan tersebut memicu partisipasi pihak swasta dan pemerintah melalui kebijakan pariwisata kota berkelanjutan. Peran *stakeholder* pemerintah yang diwakili oleh Sekertariat Daerah Kota Yogyakarta bidang Perekonomian dan Kerjasama dalam pengembangan UMKM dengan memberikan pelatihan dan support dana. Dalam mendukung kebijakan pemerintah tersebut, pihak swasta juga berkontribusi dalam meminimalisir persaingan kerja masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta diwakili oleh Favehotel ditunjukkan dengan banyak warga sekitar yang berkerja di Favehotel sebagai karyawan. Selain itu, didepan Favehotel juga banyak masyarakat berjualan cendramata, batik, daster dan lain sebagainya dalam menunjang UMKM. Dengan adanya keterlibatan berbagai *stakeholder* ini dapat mendukung kebijakan pariwisata Kota berkelanjutan di Kota Yogyakarta

3.4 Dialog/Kolaborasi (*power sharing*)

Dialog melibatkan keberadaan lingkup yang lebih besar dengan proses komunikasi di segala arah. Melalui dialog, tercipta adanya konsensus yang memungkinkan perolehan informasi menjadi lebih optimal dan bermakna dalam hubungan keterlibatan [16]. Kemampuan dialog dalam melibatkan *stakeholder*

dianggap sebagai cara yang lebih mudah untuk dilakukan mengingat pelaksanaannya berkaitan dengan konsensus pada tahap awal. Dalam mengamati terjadinya dialog dapat dilakukan dengan memastikan ada dan tidaknya wadah yang dapat digunakan untuk bertukar pikiran. Dalam hal ini upaya dialog ditempuh melalui forum FGD. Kesiapan semua *stakeholder* dalam kehadiran pada forum FGD menjadi bentuk komunikasi yang terjalin dalam mengupayakan pelaksanaan kebijakan pariwisata Kota berkelanjutan di Kota Yogyakarta.

Melalui relasi yang terbentuk antara pemerintah, pihak swasta (PHRI dan ASISTA) maupun kelompok masyarakat yang diwakili oleh paguyuban becak wisata Kota Yogyakarta di Kota Yogyakarta, pembentukan forum menjadi upaya konkret dalam memastikan pelaksanaan kebijakan pariwisata kota berkelanjutan dapat sejalan dengan tujuan-tujuan tertentu dalam hal ini pembangunan pariwisata. Keberadaan forum yang menjadi bentuk partisipasi dari pihak swasta dan masyarakat di Kota Yogyakarta serta upaya Pemerintah Provinsi dan Daerah dalam komitmen pelaksanaan kebijakan pariwisata kota berkelanjutan yang dilakukan secara berkesinambungan. Mengingat dilaksanakannya forum secara rutin 1 (satu) kali dalam sebulan, yakni di awal bulan dan akhir bulan. Pertemuan rutin ini dilakukan guna memastikan adanya campur tangan semua *stakeholder* dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata kota berkelanjutan. Upaya dalam meningkatkan keterlibatan semua *stakeholder* ditempuh dengan undangan semua *stakeholder* dalam berbagai metode yang dilakukan dalam keikutsertaan Forum FGD rutin. Upaya kolaborasi sendiri ditempuh melalui langkah awal keikutsertaan dalam forum.

3.5 Output

Rangkaian upaya pelibatan semua stakeholder dalam kebijakan pariwisata berkelanjutan di Kota Yogyakarta telah menciptakan hasil (output) yang signifikan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Peran penting semua pihak, termasuk pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat, dalam meningkatkan pariwisata berkelanjutan telah memungkinkan terlaksananya kebijakan yang menghasilkan berbagai manfaat yang dirasakan secara langsung. Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi aktif dari pihak swasta, seperti yang tercermin dalam wawancara dengan Human Resources Development Favehotel, Marina Permita Sari, telah membantu meningkatkan kualitas dan daya saing pariwisata Kota Yogyakarta. Kontribusi ini tidak hanya berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga pada peningkatan okupansi dan pendapatan pihak swasta serta pada berbagai program pengembangan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan.

Dukungan dari pihak swasta tidak hanya terbatas pada kontribusi finansial, melainkan juga pada partisipasi dalam berbagai program pelatihan, pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat, dan dukungan pada event budaya di Kota Yogyakarta. Hal ini mencerminkan komitmen pihak swasta dalam mendukung kebijakan pariwisata kota berkelanjutan dan memperkuat hubungan positif dengan pemerintah dan masyarakat. Engagement antara pemerintah dan pihak swasta menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan pariwisata. Kemudahan perizinan dan hubungan yang baik antara pihak swasta dengan

pemerintah memungkinkan terwujudnya kebijakan pariwisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Dampak dari kebijakan pariwisata kota berkelanjutan juga dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat lokal. Peningkatan kunjungan wisatawan memberikan peluang usaha baru bagi masyarakat, seperti yang dijelaskan oleh Asih, Pengelola Homestay Amarilis. Hal ini mencerminkan dampak positif dari kebijakan pariwisata terhadap peningkatan kesejahteraan dan peluang usaha bagi masyarakat setempat. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan pariwisata kota berkelanjutan di Kota Yogyakarta tidak hanya menciptakan manfaat ekonomi bagi pihak terkait, tetapi juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan. Hal ini menegaskan pentingnya kerjasama antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif.

3.6 Evaluasi

Secara lebih lanjut, keikutsertaan ini dapat ditempuh dengan memastikan ketercapaian program-program dari pihak swasta dapat menunjang pencapaian pembangunan pariwisata sehingga diperlukan pengukuran kebermanfaatan. Secara lebih lanjut evaluasi dalam hal ini dimampukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program-program dari pihak swasta sejauh ini mampu mengisi kebutuhan yang sesuai dengan sasaran program. Pengukuran evaluasi termasuk sebagai konsekuensi yang diperoleh dari *stakeholder engagement* di Kota Yogyakarta.

Tahapan ini berpotensi untuk ditempuh melalui berbagai cara oleh Pemerintah Provinsi dan Daerah. Dilakukannya evaluasi sejalan dengan adanya legitimasi yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Daerah dalam proses keterlibatan *stakeholder*. Beberapa contoh diantaranya melalui pelaporan program-program yang ada guna memastikan bahwa Pemerintah Provinsi dan Daerah dalam melakukan pemetaan *stakeholder* senantiasa mengupayakan program dapat dilaksanakan secara inklusif. Berkaitan juga dengan legitimasi Pemerintah Provinsi dan Daerah Kota Yogyakarta sebagai pengambil keputusan yang berhasil ditempuh dalam proses keterlibatan. Melalui pengukuran evaluasi juga dapat digunakan dalam menganalisis relasi yang terjalin antara keduanya, yakni kemampuan Pemerintah Provinsi dan Daerah dalam menanggapi kondisi yang dihadapi pihak swasta. Begitu juga sebaliknya, upaya pihak swasta dalam memenuhi kebutuhan daerah melalui perannya dalam program-program yang dijalankan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil data penelitian, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan mengenai penelitian ini. Adapun kesimpulan tersebut, sebagai berikut:

- a. *Stakeholder Engagement* dalam kebijakan pariwisata Kota berkelanjutan di Yogyakarta terjadi karena pengaruh tujuan dan sasaran, sumber daya dan keterampilan, pengaruh sosial, ekonomi dan lingkungan, dialog/kolaborasi (*power sharing*), output, pengukuran evaluasi dan pemahaman aktor yang

heterogen dalam kebijakan pariwisata kota berkelanjutan. *Stakeholder* yang terlibat dalam kebijakan ini melibatkan pihak Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, pihak Swasta, Masyarakat lokal, Wisatawan dan aktor Non-Pemerintah.

- b. Proses *stakeholder engagement* dalam pelaksanaan pariwisata Kota Yogyakarta belum sepenuhnya optimal karena terjadi tumpang tindih program pelatihan dan sertifikasi yang mengarah kepada ego sektoral antara Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Hal ini karena tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya Dinas Pariwisata Daerah Istimewa dan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta berjalan sendiri-sendiri dan lebih mengutamakan kepentingan masing-masing terlebih wisatawan di Kota Yogyakarta yang tidak merawat sarana dan prasarana di beberapa tempat wisata seperti di Kawasan Malioboro yang mengakibatkan pembangunan pariwisata yang belum optimal.

Referensi

- [1] H. Aliansyah and W. Hermawan, "Peran Sektor Pariwisata Pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Barat," *Bina Ekon.*, vol. 23, no. 1, pp. 39–55, 2021, doi: 10.26593/be.v23i1.4654.39-55.
- [2] N. Ardhana, "Dampak Pengembangan Pariwisata terhadap Aspek Sosial Budaya di Desa Wisata Berbasis Heritage Tourism (Studi Kasus di Desa Wisata Kampung Majapahit Bejjong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur)," Universitas Udayana, 2023.
- [3] Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, *Statistik Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2023*. Yogyakarta: Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, 2023.
- [4] Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, *Statistik Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021*. Yogyakarta: Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta., 2021.
- [5] E. Brahmanto, "Magnet Paket Wisata dalam Menarik Kunjungan Wisatawan Asing Berkunjung ke Yogyakarta," *J. Media Wisata*, vol. 13, no. 2, 2015.
- [6] Zulfikar, "Mengapa UMR di Yogyakarta Begitu Rendah?Pakar UGM Ungkap Alasannya," Detik.com.
- [7] A. Andani, "Ratusan PKL Teras Malioboro 2 Minta Kejelasan Relokasi dan Transparansi Data."
- [8] R. Aurelio, "Wajah Buram Pariwisata Yogyakarta."
- [9] S. Timur and D. Getz, "A Network Perspective On Managing Stakeholders For Sustainable Urban Tourism," *Int. J. Contemp. Hosp. Manag.*, vol. 20, no. 4, pp. 445–461, 2008, doi: 10.1108/09596110810873543.
- [10] G. Surendra, "Komunikasi Antar Stakeholder Dalam Pengembangan Desa Wisata Kubu Gadang Di Kota Padang Panjang," Universitas Andalas, 2019.
- [11] P. E. H. Susilo M, "Pendekatan Stakeholders Engagement dalam Pengembangan Desa Wisata," *J. Ilmu Komun.*, vol. 14, no. 2, 2016.
- [12] D. Saputra, "Tatakelola Kolaborasi Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Masyarakat," *J. Ilmu Pemerintah.*, vol. 3, no. 2, 2020.

- [13] J. . Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014.
- [14] C. Clemmow, P. Gill, N. Bouhana, J. Silver, and J. Horgan, “Disaggregating Lone-actor Grievance-fuelled Violence: Comparing Lone-actor Terrorists and Mass Murderers,” *Terror. Polit. Violence*, vol. 34, no. 3, pp. 558–584, 2022, doi: 10.1080/09546553.2020.1718661.
- [15] K. Ritonga, H. As’ari, and N. L. Meilani, “Whole Of Government Dalam Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Kota Pekanbaru,” *Moderat J. Ilm. Ilmu Pemerintah.*, vol. 9, no. 1, pp. 81–93, 2023.
- [16] H. B. Chenery and L. R. Christensen, *Growth and Structural Change in Developing Countries*. Harvard University Press, 2001.